

BINGKAI HARIAN KOMPAS DALAM PEMBERITAAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG TENAGA KERJA ASING

Regina Iswara Pramusita, Wiwid Noor Rakhmat

Departemen Ilmu Komunikasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

E-mail: reginaiswara@gmail.com

Abstrak

Penerbitan Peraturan Presiden tentang Tenaga Kerja Asing (Perpres TKA) menuai protes dari kelompok buruh karena terdapat tiga pasal yang dinilai merugikan tenaga kerja Indonesia. Pasal-pasal ini dianggap tidak sesuai dengan UU no. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Perpres ini juga dinilai memudahkan TKA kerah biru masuk ke Indonesia. Argumen ini muncul karena data menunjukkan peningkatan jumlah TKA kerah biru di Indonesia pada 2017. Harian Kompas, salah satu media massa di Indonesia, juga memberitakan isu ini. Media massa seharusnya berperan menjadi kontrol sosial dan memberi ruang bagi semua kelompok masyarakat. Namun, Harian Kompas cenderung memberikan ruang lebih banyak pada narasumber pemerintah. Pemilihan narasumber mempengaruhi pemberitaan harian Kompas. Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana konstruksi Perpres TKA dalam berita yang diterbitkan harian Kompas. Penelitian ini menggunakan Teori Konstruksi Realitas Sosial oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dan menggunakan analisis *framing* yang dikembangkan oleh Robert Entman.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan harian Kompas membingkai pemberitaan mengenai Perpres No. 20/2018 dalam *frame* ekonomi. *Frame* ekonomi muncul karena isu Perpres TKA berkaitan dengan tenaga kerja dan investasi asing. Temuan penelitian menunjukkan harian Kompas cenderung memihak pemerintah dalam pemberitaan Perpres TKA. Keberpihakan Kompas dapat dilihat dari seleksi isu dengan menampilkan Perpres TKA sebagai kebijakan yang solutif dan persepsi negatif masyarakat tentang Perpres TKA adalah hal yang keliru. Isu ini kemudian ditonjolkan lewat pemilihan judul-judul yang positif mengenai Perpres TKA serta pemilihan narasumber yang lebih banyak memunculkan pejabat-pejabat Istana. Ini menunjukkan harian Kompas dipengaruhi oleh sumber berita dalam menuliskan berita yang berkaitan dengan Perpres TKA.

Kata Kunci: analisis *framing*, harian Kompas, Peraturan Presiden tentang Tenaga Kerja Asing

Abstract

The issuance of the Presidential Regulation on Foreign Workers has drawn protests from labor groups because there are three articles that are considered detrimental to Indonesian workers. These articles are considered not in accordance with Labor Law No. 13/2003 . This regulation is also considered to simplify blue collar foreign workers entering Indonesia. This argument arises because the data showed an increase in the number of blue collar foreign workers in Indonesia in 2017. Kompas, one of daily newspaper in Indonesia, also reports this issue. Mass media should carry out its function as social control and provide spaces for all groups of people. However, Kompas tends to provide more spaces for the government as the informants. The choice of informants has influenced Kompas' news. Thus, this research aims to explain how Kompas constructs the news about Presidential Regulation on Foreign Workers. This study uses the Social Construction of Reality Theory which was introduced by Peter L. Berger and Thomas Luckmann. This research is a qualitative descriptive study and uses framing analysis developed by Robert Entman.

The results of this research indicate that Kompas uses economic frame in reporting on the Presidential Regulation on the Foreign Workers. Economic news is important because it has a big influence on the human life which is preoccupied by making a living to fulfill their needs. Kompas uses economic frame because the issue of the Presidential Regulation on Foreign Workers intersects with the issue of labor and foreign investment. The economic frame is indicated by the selection of issues and emphasis on certain aspects. Kompas Daily Newspaper chose to present the issue of procedure arrangement to increase Indonesian investment. Another issue presented by Kompas was that public considered the issuance of Perpres No. 20/2018 reduced job opportunities for local workers. Kompas makes certain aspects of an event stand out using positive titles related to the Presidential Regulation on the Foreign Workers. Kompas also displays certain phrases that support the selection of issues. They then highlighted through the selection of positive titles regarding the Presidential Regulation on Foreign Workers as well as the selection of informants who mostly feature government.

Keywords: framing analysis, harian Kompas, Presidential Regulation on Foreign Workers

Pendahuluan

Pers di Indonesia selain memiliki fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, juga berfungsi sebagai kontrol sosial. Dalam fungsi ini, pers harus menyelidiki kinerja pemerintah dan perusahaan, serta memberitakan apa yang berjalan baik dan apa yang tidak berjalan

baik (Kusumaningrat, 2005: 27-29). Sobur (dalam Ardianto, 2004: 206) menambahkan, dalam menjalankan fungsinya, pers harus memberikan informasi dan fakta yang benar dari berbagai sumber berita. Namun, media seringkali secara tidak sadar lebih banyak menyorot narasumber resmi dalam pemberitaan. Hal ini karena media memiliki

kebijakan redaksional dalam memproduksi sebuah berita. Karena faktor tersebut, media massa tidak menampilkan peristiwa apa adanya atau disebut dengan konstruksi sosial media massa.

Pemberitaan mengenai Perpres Tenaga Kerja Asing memenuhi media massa sejak perencanaan hingga pasca penerbitan aturan tersebut. Hal utama yang menjadi sorotan yakni peluang kerja pekerja lokal yang terancam dengan hadirnya tenaga kerja asing. Peningkatan jumlah tenaga kerja asing pada 2017 dianggap tidak diperlukan. Akademisi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Fithra Faisal H, menjelaskan bidang pekerjaan pekerja asing bisa digantikan oleh tenaga kerja lokal yang jumlahnya besar. Saat ini terdapat 43% tenaga kerja Indonesia berpendidikan SD dan SMP yang masuk dalam kategori kerah biru. (Ringkang, 2019: 1).

Selain itu, terdapat beberapa pasal yang bermasalah dan tidak sesuai dengan UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003. Pertama, pasal 10 yang menyebutkan pemberi kerja TKA tidak wajib memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) untuk mempekerjakan TKA yang merupakan pemegang saham dan menjabat sebagai anggota direksi, pegawai diplomatik

dan TKA pada jenis pekerjaan yang dibutuhkan pemerintah. Hal ini bertentangan dengan UU tentang Ketenagakerjaan pasal 42 dan 43 ayat (1) yang mengharuskan pemberi kerja mendapat RPTKA dan TKA memiliki izin tertulis dari Kementerian Ketenagakerjaan. Kedua, pasal 19 yang mengatur visa izin terbatas (Vitas). TKA diwajibkan memiliki Vitas untuk dapat bekerja di Indonesia. Dalam pasal tersebut, penerbitan Vitas oleh pejabat imigrasi dilakukan maksimal dua hari. Pasal ini dianggap memberi pelanggaran bagi pekerja asing untuk bekerja di Indonesia. Ketiga, dalam pasal 26 tidak secara gamblang mengharuskan pemberi kerja TKA untuk memberikan pendidikan dan pelatihan kepada TKI. Pemberi kerja TKA hanya wajib menunjuk TKI untuk menjadi pendamping TKA, tetapi tidak disebutkan jumlah yang harus mendampingi TKA dan diberi pelatihan oleh pemberi kerja TKA. Pasal ini dianggap tidak tegas mewajibkan setiap TKA memberikan pengetahuan (*transfer knowledge*) kepada tenaga kerja lokal. (Akbar, 2018: 1).

Akan tetapi, Harian Kompas justru mengedepankan informasi dari narasumber pemerintah dalam pemberitaan Perpres Tenaga Kerja Asing. Kompas kurang memberi ruang pada kelompok pekerja

Indonesia sebagai kelompok yang terdampak Perpres Tenaga Kerja Asing. Selain itu, Kompas lebih banyak memberi ruang pada sumber berita yang berlokasi di Jakarta, padahal tenaga kerja asing di Indonesia tersebar di beberapa daerah.

Faktor internal seperti latar belakang pengelola media dan rutinitas media, serta faktor eksternal seperti sumber berita mempengaruhi pengambilan keputusan dalam ruang pemberitaan. Faktor-faktor tersebut berdampak pada cara Kompas menyajikan realitas dalam pemberitaan mengenai Perpres Tenaga Kerja Asing. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti ingin mengetahui bagaimana Harian Kompas membingkai pemberitaan mengenai Perpres Tenaga Kerja Asing.

Paradigma Penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruksionis. Terdapat dua karakteristik penting dalam paradigma konstruksionis. Pertama, pendekatan konstruksionis menekankan pada pemaknaan dan proses bagaimana seseorang membuat gambaran tentang realitas. Makna diartikan sebagai proses aktif yang diinterpretasikan seseorang dalam suatu pesan. Kedua, paradigma ini memandang kegiatan komunikasi sebagai proses yang

dinamis. Pesan dianggap bukan sebagai *mirror of reality* yang menampilkan fakta apa adanya. Komunikator akan memilih fakta tertentu yang akan disampaikan pada komunikan, memberikan pemaknaan sendiri terhadap suatu peristiwa dipengaruhi oleh pengalaman, pengetahuannya sendiri.

Pendekatan konstruksionis menaruh perhatian pada bagaimana pesan atau teks, hubungan dengan khalayak dalam menyusun makna yang berarti menitikberatkan pada peranan teks dalam kebudayaan. Dalam pendekatan ini, pesan merupakan konstruksi, melalui interaksi dengan *receiver*. Pesan yang dimaksud merupakan pesan yang dikonstruksi dan apa yang dibaca. (Eriyanto, 2008: 40-43).

Teori Konstruksi Sosial atas Realitas

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Konstruksi Sosial atas Realitas yang diperkenalkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Berger dan Luckmann menggambarkan proses sosial melalui tindakan dan interaksinya, di mana individu menciptakan suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subyektif. Terjadi dialektika antara individu menciptakan masyarakat dan masyarakat menciptakan individu. Proses ini terjadi

melalui eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. (Bungin, 2008 : 14-15).

Penerapan gagasan Berger dalam konteks berita adalah bahwa sebuah teks berupa berita bukanlah cermin dari realitas, tetapi merupakan konstruksi atas realitas yang dibentuk oleh wartawan. Wartawan bisa jadi mempunyai pandangan dan konsepsi yang berbeda ketika melihat suatu peristiwa, dan dapat dilihat dari bagaimana mereka mengkonstruksi peristiwa itu, yang diwujudkan dalam teks berita. Berita dalam pandangan konstruksi sosial bukan merupakan peristiwa atau fakta yang sebenarnya, tetapi merupakan produk interaksi antara fakta dan wartawan. (Eriyanto, 2008: 27).

Konstruksi sosial media masa merevisi kelemahan dan melengkapi teori dan pendekatan konstruksi sosial atas realitas dengan menampilkan seluruh kelebihan media massa dan efek media pada keunggulan. Proses terbentuknya konstruksi sosial media massa diuraikan melalui beberapa tahap dari konten konstruksi sosial media massa, yaitu tahap menyiapkan materi konstruksi, tahap sebaran konstruksi, tahap pembentukan konstruksi realitas, dan tahap konfirmasi. (Bungin, 2008 : 194).

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif untuk menggambarkan dan mendeskripsikan bagaimana Harian Kompas membingkai pemberitaan Peraturan Presiden tentang Tenaga Kerja Asing. Subjek penelitian ini adalah pemberitaan mengenai Peraturan Presiden tentang Tenaga Kerja Asing yang diterbitkan oleh Harian Kompas. Peneliti menganalisis pemberitaan Perpres Tenaga Kerja Asing dalam kurun waktu 7 Maret hingga 30 Mei 2018.

Penelitian ini menggunakan analisis framing model Robert N. Entman untuk analisis data. Entman melihat framing dalam dua dimensi besar: seleksi isu dan penekanan aspek-aspek tertentu dari realitas. Dimensi seleksi isu berhubungan dengan pemilihan fakta. Dimensi ini melihat bagaimana wartawan menyeleksi aspek yang akan ditampilkan dari keseluruhan realitas yang kompleks. Kemudian penonjolan aspek tertentu dari realitas/isu. Dimensi ini berhubungan dengan penulisan fakta (Eriyanto, 2008: 187). Menurut Entman, terdapat empat cara yang sering dilakukan media dalam proses seleksi isu. Pertama, *problem identification* (identifikasi masalah), yakni bagaimana wartawan

menentukan masalah atas suatu peristiwa. Kedua, *diagnose cause* (memperkirakan penyebab masalah), yakni memperkirakan siapa/apa yang dianggap sebagai penyebab masalah. Ketiga, *make moral judgement* (membuat evaluasi moral), yakni penilaian atas penyebab masalah. Keempat, *treatment recommendation* (menekankan penyelesaian), yakni menawarkan atau menjustifikasi suatu penanganan masalah dan memprediksi hasilnya. (Eriyanto, 2008: 198).

Kemudian, peneliti menganalisis tiap berita dengan kategorisasi *frame* Urs Dahinden. Dahinden (2002: 1-2) mengungkap lima bentuk *frame* yang

Hasil dan Pembahasan

Pemberitaan yang berkaitan dengan Perpres TKA dalam harian Kompas didominasi oleh *frame* ekonomi. Hasil ini sesuai dengan asumsi peneliti bahwa Kompas akan meringkaskan pemberitaan Perpres TKA dalam *frame* ekonomi. Menurut Sedia Willing Barus, kemunculan berita ekonomi menempati urutan kedua setelah berita politik. Masalah ekonomi banyak diangkat karena memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan manusia. Berita ekonomi menjadi penting karena pada hakikatnya kehidupan manusia disibukkan dengan mencari nafkah

biasa digunakan dalam berita. Pertama, **kemajuan/informasi** yang mengacu pada konteks kemajuan yang berdimensi ilmu pengetahuan dalam berita. Kedua, **ekonomi** yang menampilkan informasi berkaitan dengan kerugian dan keuntungan ekonomi. Ketiga, **konflik** yang menunjukkan konflik kepentingan yang terjadi di antara kelompok sosial masyarakat. Keempat, **etika dan hukum**, dimana tema berita yang diangkat ditulis dalam perspektif moralitas, etika dan hukum yang berlaku. Terakhir, **personalisasi** dimana berita yang ditulis memfokuskan pada pandangan individu/personal dalam menjelaskan suatu peristiwa.

untuk memenuhi kebutuhan dan mempertahankan hidup. Berita ekonomi mencakup aspek yang sangat luas, yaitu perdagangan, finansial, perindustrian, perdagangan, pertambangan, perbankan, tenaga kerja, dunia usaha, valuta asing, dan pasar modal. (Barus, 2010: 43).

Frame ekonomi muncul dalam empat berita dari sembilan berita yang diterbitkan harian Kompas. Pendefinisian masalah (*define problem*) yang ditemukan adalah masalah prosedur/izin TKA pada berita pertama dan ketiga. **Prosedur/izin masuk TKA selama ini masih sulit dan berbelit-belit.** Berita

kelima berfokus pada masalah **investasi Indonesia kalah saing dibanding negara-negara tetangga ASEAN**. Kemudian, berita keenam berjudul “Tenaga Kerja Asing di Indonesia” juga menunjukkan *frame* ekonomi. Masalah ditekankan pada **peluang kerja pekerja lokal yang terancam akibat hadirnya TKA**.

Kemudian, pada tahap memperkirakan penyebab masalah (*diagnose cause*), Kompas menunjukkan beberapa hal sebagai penyebab masalah. Pertama, Kompas menganggap **kehadiran TKA dalam jumlah yang banyak** menyebabkan pemerintah perlu melakukan penataan prosedur masuk TKA. Penyebab masalah tersebut ditemukan pada berita pertama dan ketiga. Sementara pada berita ketiga, banyaknya TKA dianggap sebagai penyebab masalah. Selanjutnya, berita kelima “Indonesia Berusaha Perbaiki Daya Saing” menempatkan **prosedur masuk TKA yang sulit** sebagai penyebab masalah Indonesia kalah saing dari segi investasi. Terakhir, pada berita keenam, **adanya temuan TKA yang melakukan pekerjaan kasar** dianggap sebagai penyebab masalah.

Berikutnya, harian Kompas memberikan penilaian moral (*make moral judgement*) atas masalah yang telah

didefinisikan. Keempat berita yang dibingkai dalam *frame* ekonomi menunjukkan kecenderungan yang sama dalam menilai masalah. Harian Kompas menilai **penataan prosedur melalui penerbitan Perpres No.20/2018 dapat meningkatkan investasi asing di Indonesia**. Penilaian yang diberikan Kompas sesuai dengan apa yang dikatakan David Kairupan dalam bukunya “Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia”. David (2014: 3-4) mengatakan peningkatan investasi dapat terjadi apabila isu-isu klasik di Indonesia diselesaikan. Salah satu isu klasik tersebut adalah penegakan hukum. Kompas pun menilai penataan prosedur dapat dilakukan dengan menerbitkan Perpres No.20/2018 (penegakan hukum).

Penilaian Kompas terhadap penerbitan Perpres No.20/2018 cenderung memihak pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Kompas memberikan penilaian positif terhadap penerbitan Perpres TKA. Keempat berita dengan *frame* ekonomi menekankan dampak peningkatan investasi bagi Indonesia. Peningkatan investasi ini merupakan suara dari pemerintah yang telah bertemu dengan kelompok pengusaha dan investor.

Elemen *framing* terakhir adalah penekanan penyelesaian/rekomendasi (*treatment recommendation*). Terdapat beberapa rekomendasi yang ditawarkan Kompas pada pemberitaan Perpres TKA dalam bingkai ekonomi. Pertama, pemerintah menyiapkan Perpres No.20/2018 untuk mengatasi masalah prosedur yang sulit. Rekomendasi kedua yang ditemukan dalam tiga berita adalah menerbitkan kebijakan turunan untuk melengkapi Perpres No.20/2018. Rekomendasi ketiga yang ditawarkan Kompas adalah pengawasan TKA yang lebih serius. Rekomendasi keempat yang ditawarkan Kompas adalah perlu basis data mengenai TKA yang terus diperbarui.

Kompas cenderung menggunakan judul-judul bernada positif terkait Perpres TKA dalam penonjolan aspek-aspek tertentu atas realitas. Contoh-contoh dari berita yang menggunakan judul positif antara lain “Presiden Perintahkan Penataan Prosedur”, “Indonesia Berusaha Perbaiki Daya Saing”, dan “Perihal Perpres Tenaga Kerja Asing: Lebih Ketat, Lebih Jelas”. Kemudian, Kompas juga memilih frasa-frasa tertentu dalam menguatkan isu penataan prosedur dapat meningkatkan investasi seperti “iklim investasi di dalam negeri semakin kondusif”, “meningkatkan daya tarik investasi maupun

kepentingan terserapnya tenaga kerja kita”, “momentum untuk kembali melakukan penataan terhadap tenaga kerja asing”, “kehadiran TKA itu bersamaan dengan masuk atau meningkatnya investasi asing”, “kehadiran ‘investasi asing’, ‘utang’ dan ‘sekaligus TKA’ niscaya tak bisa dihindari”, “Perpres No 20/2018 itu memiliki dampak positif bagi iklim investasi dan ketenagakerjaan”, “keberadaan TKA sebenarnya dalam jangka pendek bisa dikatakan (akan) cukup berkontribusi dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia”.

Sementara pada isu kekhawatiran masyarakat terhadap Perpres TKA yang dianggap mengurangi peluang kerja tenaga lokal, Kompas juga menekankan melalui beberapa frasa. Frasa yang ditampilkan Kompas adalah “kekhawatiran terhadap masuknya tenaga kerja asing (TKA) yang tak terkendali dan mengancam kesempatan kerja bagi warga negara Indonesia”. Namun Kompas mengarahkan pembacanya untuk melihat bahwa kehadiran TKA tidak bisa ditolak. Ini ditunjukkan melalui frasa “berbagai perjanjian perdagangan bebas antara lain Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-China (ACFTA), masuknya TKA memang tak dapat ditolak.”. Harian Kompas

kemudian membingkai bahwa Perpres TKA dibuat demi kepentingan peningkatan investasi. Bingkai ini ditekankan melalui frasa, yaitu “pertimbangan peningkatan investasi”, “investasi asing datang selalu dalam satu paket yang berisi dana, teknologi, dan tenaga kerja”.

Pembingkai yang dilakukan Kompas dalam pemberitaan yang berkaitan dengan Perpres TKA menunjukkan bahwa Kompas dipengaruhi kepentingan sumber berita. Narasumber yang ditampilkan Kompas mayoritas adalah pejabat Istana. Narasumber yang banyak ditampilkan adalah presiden, wakil presiden, staf khusus presiden dan wakil presiden, serta kementerian. Narasumber tersebut memberikan informasi positif/mendukung Perpres No.20/2018 dalam pemberitaan. Berbeda dengan kelompok pekerja yang hanya muncul pada satu berita saja, yakni pada berita berjudul “Tenaga Kerja Asing Jadi Sorotan” dan “24 Kementerian-Lembaga Terlibat”. Ini menunjukkan harian Kompas dipengaruhi oleh sumber berita dalam menyusun konstruksi atas Perpres Tenaga Kerja Asing dalam bentuk berita.

Penulis berpendapat harian Kompas menyajikan berita yang berhubungan dengan Perpres TKA secara jelas dipengaruhi oleh

faktor ekstramedia yakni sumber berita. Penyajian berita yang lebih banyak menampilkan sumber berita dari pejabat Istana membuat isi berita cenderung memihak pemerintah. Perpres TKA dikonstruksikan memiliki banyak manfaat positif dan masyarakat tidak perlu mengkhawatirkan isinya karena menurut pemerintah hanya mengubah prosedural saja.

Penggunaan narasumber juga lebih banyak memberi ruang pada narasumber di Jakarta dibanding daerah lainnya. Padahal tenaga kerja asing jumlahnya tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Pemberian ruang lebih pada narasumber di Jakarta menunjukkan produksi berita yang “Jakarta-sentris”. Perpres TKA merupakan kebijakan yang berlaku secara nasional. Perpres tersebut tidak hanya berdampak pada kelompok pekerja di Jakarta, namun di seluruh Indonesia. Namun, realita yang disajikan Kompas terkait Perpres TKA hanyalah realita di Jakarta.

Cara Kompas menampilkan pejabat Istana lebih banyak mempengaruhi konstruksi yang muncul dalam pemberitaan Perpres TKA. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan tentunya memberikan informasi yang menguntungkan bagi pemerintah,

yakni informasi-informasi positif tentang Perpres TKA. Perpres TKA dibingkai sebagai kebijakan yang solutif dengan menekankan pada dampak ekonomi. Kelemahan Perpres TKA tidak mendapat perhatian yang sama besarnya karena sumber berita lain seperti kelompok pekerja, ekonom, atau akademisi tidak mendapat ruang pemberitaan yang sama dengan pemerintah.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian, harian Kompas menampilkan *frame* ekonomi. Berita ekonomi menjadi penting karena memiliki pengaruh besar pada kehidupan manusia yang disibukkan dengan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan dan mempertahankan hidup. *Frame* ekonomi muncul karena isu Perpres TKA bersinggungan dengan masalah tenaga kerja dan investasi asing.

Frame ekonomi ditunjukkan dengan seleksi isu dan penekanan pada aspek-aspek tertentu. Harian Kompas memilih menampilkan isu penataan prosedur demi meningkatkan investasi Indonesia. Isu lain yang ditampilkan Kompas adalah masyarakat menilai penerbitan Perpres No.

20/2018 mengakibatkan peluang kerja yang terancam akibat hadirnya TKA. Berbeda dengan masalah investasi, harian Kompas meringkai persepsi negatif masyarakat ini keliru. Argumentasi (*make moral judgement*) yang diberikan Kompas adalah Perpres No. 20/2018 justru akan berdampak baik bagi terciptanya lapangan pekerjaan. Harian Kompas juga menampilkan keuntungan-keuntungan yang disebutkan bagi pemerintah daerah dengan adanya pendapatan daerah.

Bingkai harian Kompas yang cenderung memihak pemerintah dapat dilihat dari bagaimana Kompas melakukan penonjolan aspek tertentu dari suatu peristiwa dengan menggunakan judul-judul yang bernada positif terkait Perpres Tenaga Kerja Asing. Kompas juga menampilkan frasa-frasa tertentu yang mendukung seleksi isu.

Selain itu, keberpihakan harian Kompas pada pemerintah juga dapat dilihat dari pemilihan narasumber. Narasumber yang ditampilkan oleh harian Kompas mayoritas adalah pejabat Istana seperti presiden, wakil presiden, staf kepresidenan, serta kementerian. Sementara pihak yang kontra dengan Perpres TKA hanya diberikan ruang sedikit.

Daftar Pustaka

Buku

- Ardianto, Elvinaro. (2004). *Komunikasi Massa Suatu Pengantar*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Barus, Sedia Willing. (2010). *Jurnalistik: Petunjuk Teknis Menulis Berita*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Bungin, Burhan. (2015). *Konstruksi Sosial Media Massa: Kekuatan Pengaruh Media Massa, Iklan Televisi, dan Keputusan Konsumen Serta Kritik Terhadap Peter L. Berger & Thomas Luckmann*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Eriyanto. (2008). *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: PT LkiS Pelangi Aksara.
- Kairupan, David. (2014). *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Kusumaningrat. (2012). *Jurnalistik: Teori dan Praktik*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sobur, Alex. (2012). *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sudibyo, Agus. (2001). *Politik Media dan Pertarungan Wacana*. Yogyakarta: LkiS.

Jurnal Online

- Dahinden Urs. (2002). Framing as a Theory for the Communication of Science and Technology. Diakses dari PCST International Conference, https://pcst.co/archive/pdf/Dahinden_PCST2004.pdf pada 31 Juli 2019.

Koran

- Hidayat, Andi Riza dan Anita Yossihara. (2018). "Informasi Dinilai Menyimpang" dalam Harian Kompas, 25 April 2018, halaman 19. Jakarta.

Berita Online

- Akbar, Wishnugroho. (2018). "Bedah Pasal Kontroversi Perpres Jokowi soal TKA". <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180502071142-12-295009/bedah-pasal-kontroversi-perpres-jokowi-soal-tka>, diakses Jumat, 19 April 2019.
- Ringkang, Gumiwang (2019). "Apakah Jumlah Tenaga Kerja Asing Berkorelasi dengan Pengangguran?". <https://tirto.id/apakah-jumlah-tenaga-kerja-asing-berkorelasi-dengan-pengangguran-djQP>, diakses Jumat, 19 April 2019.